KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** **DIREKTORAT BADAN USAHA**	**Nomor SOP**	: **AHU-68.OT.02.02**
	Tanggal Pembuatan	: **16 Desember 2024**
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: **24 Februari 2025**
	Disahkan Oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** **Widodo**
	NAMA SOP	**: PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BERSAMA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa 5 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Desa dan Bersama 2. Memahami ketentuan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Bersama 3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id 4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Teknologi Informasi	1. Peraturan perundang-undangan terkait 2. Komputer dan kelengkapannya 3. Data Badan Usaha Milik Desa dan Bersama 4. Jaringan internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format isian dan dokumen pendukung yang disampaikan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BERSAMA

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Sistem Administrasi Badan Usaha	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi data isian penyampaian pendaftaran badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama melalui Sistem Administrasi Badan Hukum www.ahu.go.id			Data yang telah diverifikasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi berupa : 1. Nama 2. Kedudukan dan alamat 3. Wilayah 4. Jenis BUMDesa atau BUMDesa Bersama	*Real time*		Permohon adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
2	Menerbitkan sertifikat pendaftaran badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama				*Real time*	Sertifikat pendaftaran badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama	Sertifikat pendaftaran badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang telah diberi nomor sertifikat dikirim ke Sistem Informasi Desa
3	Mengunduh dan mencetak Sertifikat pendaftaran badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama				*Real time*	Cetak Sertifikat pendaftaran badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama	Sertifikat pendaftaran badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama diterima dalam bentuk softcopy yang dapat didownload dan dicetak oleh Pemohon (Notaris).